

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pariwisata merupakan sektor yang sangat berpengaruh pada pergerakan roda perekonomian. Sektor pariwisata dapat berkontribusi dalam devisa negara, berkontribusi terhadap penerimaan PAD (Pendapatan Asli Daerah), dan dapat menciptakan lapangan pekerjaan **(Rusyidi dan Ferdiansyah, 2018: dalam Kristianus Simon Hale Molan.,2022)**. Dari uraian tersebut menjelaskan dan mempertegas bahwa pariwisata di Indonesia yang terus menerus dikembangkan oleh pemerintah bertujuan sebagai pilar pembangunan nasional karena mampu menopang perekonomian nasional.

Sejalan dengan pembangunan sektor pariwisata Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif saat ini memiliki program yang bertujuan untuk pengembangan pariwisata yaitu dengan adanya desa wisata yang memiliki potensi wisata. Dengan program pengembangan desa wisata ini dapat berdampak terhadap peningkatan pertumbuhan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, memberantas kemiskinan, memajukan kebudayaan, melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya.

Salah satu pengembangan Daya Tarik Wisata adalah Desa Wisata sebagai bentuk kegiatan wisata alternatif dalam pengembangan Daya Tarik Wisata, khususnya terkait dengan keragaman budaya dan keunikan alam. Melalui Desa Wisata, maka suatu Destinasi Pariwisata akan memiliki keragaman atau diversifikasi produk yang akan membuka peluang kunjungan ulang bagi wisatawan

yang pernah berkunjung ke daerah atau destinasi tersebut. Pengembangan Desa Wisata juga dianggap mampu meminimalkan potensi urbanisasi masyarakat dari pedesaan ke perkotaan dikarenakan mampu menciptakan aktifitas ekonomi di wilayah pedesaan yang berbasis pada kegiatan pariwisata.

Daya produktif potensi lokal termasuk didalamnya adalah potensi-potensi wilayah pedesaan akan dapat didorong untuk tumbuh dan berkembang dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh desa, sehingga akan dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mendorong pengembangan bidang sosial budaya dan ekonomi masyarakat pedesaan. Lebih lanjut, akan dapat didorong berbagai upaya untuk melestarikan dan memberdayakan potensi keunikan berupa budaya lokal dan nilai-nilai kearifan lokal yang ada di masyarakat yang cenderung mengalami ancaman kepunahan akibat arus globalisasi yang sangat gencar dan telah memasuki wilayah pedesaan.

Desa wisata dibangun berdasarkan potensi dari lingkungan desa yang bisa dimanfaatkan dan dapat dikembangkan seperti adanya sebuah tradisi yang menjadi ciri khas, keunikan desa, aksesibilitas dan sarana prasarana yang mendukung program desa wisata, keamanan yang terjamin, terjaganya ketertiban, dan kebersihan. kemudian dengan desa wisata secara tidak langsung dapat mendorong masyarakat lokal untuk melestarikan kekayaan alam dan kebudayaan yang dimiliki di desa tersebut. Potensi yang dimiliki oleh suatu daerah atau desa dapat mengundang wisatawan untuk berwisata dan menciptakan alternatif baru dalam berbagai kegiatan yang dapat dijadikan kegiatan wisata.

Salah satu kawasan yang memiliki potensi pariwisata yaitu Jawa Barat tepatnya di kabupaten Bandung. Berdasarkan **Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bandung No. 4 Tahun 2019** Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2018-2025. Pemerintah Kabupaten Bandung melakukan Pembangunan di sektor pariwisata, karena kabupaten Bandung merupakan daerah yang mempunyai kawasan atau desa-desa yang berpotensi pariwisata. Kemudian Pembangunan pariwisata di kabupaten Bandung mengarahkan kepada wujud dari kontribusi Pemerintah terhadap peningkatan kualitas lingkungan alam, budaya serta peningkatan pertumbuhan ekonomi yang akan berdampak untuk kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya Pemerintah Kabupaten Bandung juga ikut mengatur dalam program pengembangan Desa Wisata yang tertera pada **Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bandung No. 07 2020**, karena melihat kawasannya yang sangat mendukung dalam potensi wisata.

Desa wisata dapat memberikan dampak yang positif bagi pariwisata sehingga menyadarkan masyarakat bahwa kawasan mereka mempunyai potensi desa wisata, Tujuan dari pengembangan desa wisata seperti yang tertera dalam **Peraturan Bupati Bandung Nomor 47 Tahun 2010** tentang Penetapan Kawasan Desa Wisata di Kabupaten Bandung yaitu, berkembangnya potensi budaya serta wisata yang terdapat pada masing-masing desa wisata, terpelihara atau terbinanya tata kehidupan serta seni budaya masyarakat, dan meningkatkan perekonomian masyarakat dengan memanfaatkan potensi lingkungan untuk kepentingan wisata budaya, agro dan tirta.

Dari beberapa peraturan tersebut kabupaten bandung menetapkan desa yang layak dan berpotensi untuk menjadi desa wisata dan tertera dalam surat **Keputusan Bupati Bandung Nomor 556.42/Kop/72-Dispopar/2011** tentang Penetapan Desa Wisata di Wilayah Kabupaten Bandung. Berikut data desa yang telah ditetapkan sebagai desa wisata:

**Tabel 1. 1**  
**Nama Desa-desa Wisata di Kabupaten Bandung**

No	Nama Desa Wisata	Jenis Wisata	Produk Unggulan
1	Desa Alam Endah Kecamatan Rancabali	Agroekowisata	Makanan olahan strawberry, kerajinan tangan, pertanian dan perkebunan
2	Desa Gembung Kecamatan Pasirjambu	Agroekowisata	Makanan olahan strawberry, kerajinan tangan, pertanian dan perkebunan
3	Desa Panundaan Kecamatan Ciwidey	Agroekowisata	Kerajinan tangan, pertanian, wisata edukasi, homestay dan seni budaya
4	Desa Lebak Muncang Kecamatan Ciwidey	Agroekowisata	Kerajinan tangan, kelinci, pertanian dan perikanan
5	Desa Lamajang Kecamatan Pangalengan	Agroekowisata dan Budaya	Kerajinan tangan, homestay, kuliner, pertanian, peternakan, seni budaya dan arung jeram
6	Desa Ciburial Kecamatan Cimenyan	Agroekowisata	Kerajinan tangan, seni budaya dan peternakan

7	Kampung Cibolerang Desa Cimanuk Kecamatan Cileunyi	Kampung seni dan wisata	Seni budaya, kuliner tradisional, peternakan, pertanian dan perkebunan
8	Desa Laksana Kecamatan Ibun	Agroekowisata	Kawah Kamojang, budaya, kuliner, peternakan, pertanian dan perkebunan
9	Desa Rawabongo Kecamatan Ciwidey	Agroekowisata	Seni budaya, kerajinan tangan, kuliner, peternakan, pertanian dan perkebunan
10	Kelurahan Jelekong Kecamatan Baleendah	Seni Budaya	Kerajinan tangan, seni budaya, pertanian, perkebunan, seni lukis dan kuliner tradisional

**Sumber: Lampiran Surat Keputusan Bupati Bandung No. 556.42/Kop.71-Dispar/2011**

Program Desa Wisata Alamendah (DAWALA) Ditetapkan sebagai salah satu Desa Wisata melalui **Keputusan Bupati Bandung No. 556.42/kep.71-DISBUDPAR/2011** pada tanggal 2 Februari 2011 dinaungi oleh pemerintahan Desa Alamendah, dan dikelola oleh lembaga sosial (masyarakat) dengan mempunyai konsep yang memadukan daya tarik wisata alam dan budaya, layanan fasilitas umum pariwisata, serta aksesibilitas yang memadai, dengan tata cara dan tradisi kehidupan masyarakat yang bertujuan untuk pemberdayaan masyarakat dengan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan.

Sejak berdirinya program DAWALA ini belum langsung memiliki produk paket wisata yang dapat ditawarkan sehingga sekitar depalan tahun pertama hanya

sedikit wisatawan yang berkunjung, kemudian di tahun 2019 tim program Desa Wisata Alamendah mulai berfokus pada pengembangan inovasi produk dan paket wisata dengan memanfaatkan potensi yang ada. Paket aktivitas wisata yang ditawarkan mulai dari bertani, membuat olahan makanan, berlatih pencak silat dll yang termasuk kedalam kegiatan masyarakat desa Alamendah sehari-hari.

Dengan adanya perkembangan dari tahun ke tahun Desa Wisata Alamendah tentu memiliki pengasilan yang cukup tinggi dan memiliki beberapa penghargaan, hal tersebut hasil pencapaian dari wujud nyata inovasi, kolaborasi dan adaptasi dari para pelaku pariwisata serta tim ekonomi kreatif yang dapat memanfaatkan potensi lokal, sehingga menjadi daya tarik wisatawan yang menjadi peluang terciptanya lapangan pekerjaan. Dan selain itu tujuan utama dari adanya pengembangan desa wisata ini untuk melestarikan kekayaan alam yang ada dalam lingkungan dengan menumbuhkan harapan-harapan bagi masyarakat.

Kemudian sejalan dengan pemaparan yang di sampaikan oleh **Pajriah (2018)** salah satu peran sentral dalam pengembangan pariwisata adalah Sumber Daya Manusia (SDM) yang menjadi pelaku utama pengelola pariwisata untuk adanya perkembangan karena mampu menggerakkan daya saing industri pariwisata budaya sekaligus inisiator kegiatan-kegiatan pariwisata. Pengembangan pariwisata merupakan amanat **UU No 10 Tahun 2009 pasal 11** tentang kepariwisataan yang menyatakan bahwa Pemerintah bersama lembaga yang terkait dengan kepariwisataan menyelenggarakan kepariwisataan untuk mendukung pembangunan kepariwisataan.

Pengembangan desa wisata tidak hanya menjadi tanggung jawab pengelola desa wisata atau pemerintah saja, namun semua pihak yang terlibat seperti masyarakat, pihak swasta, pemangku kepentingan dan elemen lainnya dapat ikut serta dalam pengembangan pariwisata untuk menjadi tolak ukur dan mengetahui kebutuhan kedepannya agar berkembang secara bertahap. dan membutuhkan kerja dalam pengembangan pariwisata yang akan mendorong terbentuknya jejaring kebijakan (*Policy network*) sebagai alat komunikasi.

Jejaring kebijakan ini merupakan suatu hubungan yang terbentuk akibat kerja sama diantara aktor atau pemangku kepentingan tersebut. **Katzenstein yang dikutip oleh Hidayat, dkk. (2015)** menggunakan konsep *network* sebagai karakteristik umum hubungan antara sektor publik dan privat dalam implementasi kebijakan. Sedangkan Lehbruch (1984, dalam Hidayat dkk.2015) menggunakan istilah *network* untuk menghubungkan pihak-pihak ke arah pemusatan korporasi.

Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa konsep jaringan berfokus pada hubungan antara *state* dan *non-state* (industri, *NGO*, *interests group*, *CSO*) dan pola hubungan tersebut didasarkan pada interdependence atau saling ketergantungan. **Sawitri (2008), dalam Ifah dkk. (2012)** menjelaskan bahwa jejaring kebijakan pada tahap perumusan kebijakan memberi kontribusi terhadap perubahan tujuan dengan kemunculan aktor-aktor yang sarat dengan nilai-nilai motivasi dan kepentingan.

Pengelolaan pengembangan dan memajukan desa wisata tentunya berjalan dengan dibantu oleh beberapa stakeholder atau elemen lainnya dalam pemangku kebijakan yang mendukung berjalannya suatu program dan kegiatan didalamnya,

karena dengan itu sangat bisa membantu secara cepat dalam pengembangan dengan bantuan dan dorongan yang mereka berikan. Adapun Aktor-aktor yang terlibat didalam pengembangan Desa Wisata Alamendah yaitu pemerintahan Desa Alamendah, akademisi, pihak swasta, masyarakat dan media. Para aktor ini mempunyai tujuan yang sama untuk mengembangkan Desa Wisata Alamendah namun memiliki strategi yang berbeda-beda.

Berdasarkan pemaparan yang telah dijabarkan diatas dengan memanfaatkan sumber literatur dan pertimbangan data-data pendukung yang didapatkan, maka ditemukan kendala- kendala dalam Pengembangan Desa Wisata Alam Endah yaitu:

1. Kekurangan Sumber Daya Manusia untuk menjadi generasi penerus dalam pengembangan Desa Wisata Alamendah, karena kurangnya minat masyarakat atau pemuda dan pemudi yang ada di kawasan Desa Alamendah.
2. Pemerintah yang meberikan fasilitas berupa pelatihan (*Publik speaking*) bagi SDM yang ada di Desa Wisata Alamedanh dirasa kurang efektif
3. Proses pemasaran atau promosi yang kurang maksimal menjadikan Desa Wisata Alamedah kurang terkenal
4. Kondisi hubungan yang terjalin dalam komunikasi aktor pengetur kebijakan program pengembangan Desa Wisata
5. Aktor yang terlibat belum optimal menjalankan fungsi yang sudah diatur dalam pembuatan program pengembangan Desa Wisata menjadikan berdampak terhadap SDM, fasilitas dan Promosi

Maka Jejaring Kebijakan (*Policy Network*) dalam Pengembangan Desa Wisata Alamendah dirasa belum optimal dilihat dari kendala yang terdapat pada

beberapa *stakeholder* dalam pengembangan yang menjadikan ada fungsi dan hubungan aktor belum berjalan sesuai dengan konsep jejaring kebijakan pada program Desa Wisata Alamendah untuk mengembangkan Desa Wisata kedepannya. Dari latar belakang masalah diatas dan dengan menemukan beberapa kendala maka perlu di teliti perihal jejaring kebijakan dalam pengembangan agar berjalan lebih optimal. Oleh sebab itu penelitian ini berjudul **“Jejaring Kebijakan dalam Pengembangan Desa Wisata Alam Endah (DAWALA) di Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung”**.

### **1.2 Fokus Penelitian**

Peneliti memilih untuk memfokuskan penelitian kepada Jejaring Kebijakan dalam Pengembangan Desa Wisata Alamendah (DAWALA) Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung. Hal ini berdasarkan dari permasalahan yang dapat menghambat pengembangan pada desa wisata alamendah. Peneliti juga mendalami permasalahan yang fokus kepada peran *stakeholder* atau aktor-aktor yang ada dalam pengembangan desa wisata. Tujuan dari penelitian ini untuk terciptanya jejaring kebijakan dalam pengembangan desa wisata di Alam endah yang optimal dan berkualitas.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan konteks penelitian dan fokus penelitian yang telah dipaparkan di atas dengan memanfaatkan studi literatur dan pertimbangan data-data pendukung yang didapatkan, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut: Bagaimana Jejaring Kebijakan dalam Pengembangan Desa Wisata Alam Endah (DAWALA) Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian usulan laporan penelitian riset dan praktik ini, yaitu untuk Mengetahui Jejaring Kebijakan dalam Pengembangan Desa Wisata Alamendah (DAWALA) kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung.

#### **1.5 Kegunaan Penelitian**

Mengingat penelitian yang akan dibahas, peneliti ingin memberikan manfaat baik secara teoritis maupun mendasar. Tujuan dari analisis ini adalah untuk:

1. Kegunaan Teoritis

Peneliti mengharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan, pengalaman, kemampuan dan dapat menjadi masukan bagi peneliti selanjutnya serta dapat memperluas wawasan dalam penerapan teori-teori yang peneliti peroleh selama perkuliahan di jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan Bandung

2. Secara Praktis

Peneliti mengarapkan hasil penelitian dapat menjadi bahan pertimbangan bagi proses pemecahan masalah terkait Jejaring Kebijakan dalam pengembangan Desa Wisata Alamendah (DAWALA) yang tentunya pemerintah harus selalu ada dalam pengawasan serta *stakeholder* lainnya yang akan saling bekerja sama dalam pengembangan desa wisata karena dengan jejaring kebijakan yang berkualitas pengembangan desa wisata akan berjalan dengan optimal. Kemudian rencana kerja yang sudah direncanakan akan berjalan baik dan tentunya berpengaruh terhadap perkembangan wisata di desa Alamendah.